

## **RELASI-RELASI KEKUASAAN DI BALIK PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA BALI**

*I Nyoman Wijaya\**

### **ABSTRACT**

*Knowledge hidden in the discourse of tourism in the official speech of President Soeharto August 16, 1968 made by the local government authority by issuing an expression Bali discourse of Cultural Tourism. However, tourism is initially expected to be one source of foreign exchange, was stagnated in 1976 and lasted for a decade. It gives an opportunity for conservative organic intellectuals from various schools to achieve the interests of each group. That is why behind the management of the tourism industry hidden relations of power. Hidden phenomenon is described in this study using a frame of mind Michel Foucault on Power and Knowledge. The use of a frame of mind that facilitates the application of historical methods is ranging from heuristic to synthesis. Through the workings of it, it can be seen almost all of the organic intellectual conservative who has managed to capture the knowledge of the power speak hidden behind the phrase discourse of Cultural Tourism for the benefit of each group.*

**Keywords:** *cultural tourism, PKB, Ekadasarudra, invented art, organic intellectuals*

### **ABSTRAK**

Pengetahuan yang tersembunyi di balik wacana pariwisata dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto 16 Agustus 1968 dijadikan kekuasaan oleh pemerintah daerah Bali dengan cara mengeluarkan ungkapan wacana Pariwisata Budaya. Akan tetapi, pariwisata yang semula diharapkan mampu menjadi salah satu sumber devisa negara, mengalami kemandekan tahun 1976 dan berlangsung selama satu dekade. Hal itu memberikan peluang bagi intelektual organik konservatif dari berbagai aliran untuk meraih kepentingan kelompok masing-masing. Itulah sebabnya di balik pengelolaan industri pariwisata tersembunyi relasi-relasi kekuasaan. Fenomena tersembunyi itu diterangkan dalam studi ini dengan memakai kerangka berpikir Michel Foucault tentang *Power And Knowledge*. Penggunaan kerangka berpikir itu memudahkan penerapan metode sejarah mulai dari heuristik hingga sintesis. Melalui cara kerja itu, dapat diketahui hampir semua intelektual organik konservatif yang memiliki kekuasaan berbicara berhasil menangkap pengetahuan tersembunyi di balik ungkapan wacana Pariwisata Budaya untuk kepentingan kelompok masing-masing.

**Kata Kunci:** *pariwisata budaya, PKB, Ekadasarudra, invented art, intelektual organik*

---

\* Fakultas Sastra , Universitas Udayana, Bali

## PENGANTAR

Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1968 Presiden Soeharto antara lain menyatakan bahwa tahap pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah memberikan perhatian khusus terhadap kepariwisataan Bali. Hal itu dilakukan dengan cara membenahi infrastruktur kepariwisataan, seperti perbaikan Lapangan Terbang Tuban dan jaringan lalu lintas. Bali diberikan prioritas karena telah mendapat kunjungan wisatawan asing jauh sebelum bangsa Indonesia lahir (*Suara Indonesia*, 19 Juni 1965:1).

Pemerintah Daerah Bali kemudian menangkap pengetahuan yang tersembunyi di balik wacana itu untuk dijadikan kekuasaan mengatur jalannya pariwisata Bali dengan cara mengeluarkan ungkapan wacana Pariwisata Budaya. Ada tiga hal penting dalam ungkapan wacana itu, yaitu, pertama, pariwisata Bali harus menekankan kebudayaan sebagai daya tarik utama pulau di mata wisatawan. Kedua, *resort* pariwisata harus disebarluaskan ke seluruh pulau supaya memungkinkan orang Bali berpartisipasi dalam usaha pariwisata sehingga penyebaran pendapatan berlangsung seadil-adilnya di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, orang Bali hendaknya memanfaatkan prestise pulau mereka di mata dunia luar dan ekonomi pariwisata untuk kas negara sehingga identitas budayanya mendapat pengakuan oleh pemerintah pusat (memperkuat posisi mereka di tengah bangsa Indonesia) (Picard, 2006:185).

Setelah pariwisata Bali mengalami kemundakan di tahun 1976 yang berlangsung selama satu dekade (Picard, 2006:71), pengetahuan yang tersembunyi di balik ungkapan wacana Pariwisata Budaya ditangkap oleh intelektual organik Bali, lalu dijadikan kekuasaan untuk mengembangkan pariwisata dan sekaligus melestarikan kebudayaan Bali. Praktik kekuasaan itu menimbulkan perlawanan dari kalangan intelektual organik progresif, namun bersamaan dengan munculnya kelompok akademisi yang memberikan pembelaan terhadap praktik Pariwisata Budaya. Permasalahan itu dikaji dalam studi ini dengan mengajukan dua pertanyaan penelitian, yakni, pertama, dengan cara apa

intelektual organik konservatif dari berbagai aliran mengaktualisasikan kekuasaannya untuk melestarikan kebudayaan Bali? Kedua, mengapa dan bagaimana intelektual organik progresif melakukan perlawanan praktik ungkapan wacana Pariwisata Budaya yang justru dibela oleh kaum akademisi terkemuka di zamannya?

Materi jawaban kedua pertanyaan itu dicari pada sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Pendalaman materi jawaban dan rekonstruksi fakta yang berhasil ditemukan kemudian dikerjakan dengan menggunakan kerangka berpikir Foucault, terutama mengenai Kekuasaan dan Pengetahuan. Menurut Piliang, Foucault mengatakan pada setiap wacana terdapat relasi yang saling terkait antara ungkapan wacana, pengetahuan (*knowledge*) yang melandasinya, dan relasi kekuasaan yang beroperasi di baliknya. Setiap wacana menyatu dengan kekuasaan yang beroperasi di baliknya; dan juga tidak bisa dipisahkan dari relasi kekuasaan yang tersembunyi di baliknya, yang merupakan produk dari praktik kekuasaan (Piliang, 2004:223)

Kekuasaan yang dimaksud Foucault bersifat *plural* tidak sentralistik, yang tumbuh dari berbagai ruang *periferal*, dan ada di mana-mana (Piliang, 2004:223). Foucault, seperti yang dikatakan oleh Konrad Kebung tidak mencari relasi-relasi kekuasaan pada kuasa represif, struktur politis, tuan dan hamba, pemerintah, dan kelas sosial dominan. Ia menaruh perhatian pada mekanisme kuasa dan strategi kuasa. Ia tidak berbicara tentang apa itu kuasa, melainkan bagaimana kuasa dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran (*Basis*, No. 01–02, Tahun Ke-51:34). Foucault justru mencari kekuasaan di tempat-tempat yang tersulit, yakni dalam kinerja perasaan, cinta, kesadaran, naluri dan dalam kungkungan pedoman, pengamatan dokter serta perubahan berdampak luas dalam bidang ilmu, seperti biologi dan linguistik (Foucault, 1980:114)

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak mencerminkan kelas (*bourgeois*) atau elite penguasa maupun atribut-atributnya, melainkan strategi yang diakibatkan oleh fungsi (*disposisi*, *manuver*,

taktik, dan teknik). Kekuasaan tidak berasal dari ekonomi maupun politik karena memang tidak ada dasarnya. Kekuasaan bertahan sebagai jaringan kompleks yang tak terbatas dari kekuasaan mikro dari hubungan yang meresap pada setiap aspek kehidupan sosial. Kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga mencipta (Foucault, 1980:114). Kekuasaan juga menciptakan kebenaran dan karena itu juga memiliki legitimasinya. Dengan kata lain, kekuasaan dalam pandangan Foucault, seperti dikatakan Simon Philpott, bukan sekedar sesuatu yang memaksa, menyensor, memeras, menutupi, dan menyembunyikan, melainkan juga bersifat produktif, menghasilkan realitas, menghasilkan domain objek, dan ritual kemerdekaan (Philpott, 2003:22).

Berangkat dari kerangka berpikir Foucault seperti tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada wacana pariwisata terdapat saling keterkaitan antara ungkapan wacana pariwisata, pengetahuan yang melandasinya, dan relasi kekuasaan yang beroperasi di baliknya. Salah satu ungkapan wacana pariwisata yang terpenting dalam kepariwisataan Bali adalah doktrin Pariwisata Budaya yang dilandasi oleh suatu pengetahuan bahwa Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk Pariwisata (Picard, 2006:185). Pengetahuan itu kemudian ditangkap oleh intelektual organik konservatif untuk dijadikan kekuasaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan melestarikan seni, adat, dan agama peninggalan zaman kerajaan. Politik kebudayaan seperti itu mengakibatkan praktik keagamaan Hindu di Bali menjadi lebih mengutamakan ritual daripada hakikat agama. Pengetahuan yang tersembunyi di balik ungkapan wacana politik kebudayaan intelektual organik konservatif itu ditangkap oleh kelompok intelektual organik progresif untuk dijadikan sebagai kekuasaan melakukan perlawanan.

Istilah intelektual organik dalam studi ini diambil dari Antonio Gramsci. Ia menyebutkan ada dua tipe intelektual, yakni intelektual tradisional dan organik. Intelektual tradisional adalah kaum pujangga, ilmuwan, dan sebagainya yang memiliki posisi dalam masyarakat dan mempunyai aura antarkelas tertentu, tetapi berasal dari hubungan

kelas masa lampau dan masa kini, sedangkan intelektual organik adalah elemen pemikir dan pengorganisasian dari sebuah kelas sosial fundamental tertentu. Mereka lebih mudah dibedakan oleh profesinya daripada fungsinya mengarahkan gagasan dan aspirasi dari kelasnya, tempatnya berada secara organik. Intelektual dalam pandangan Gramsci, bukan sebagai sebuah kategori sosial yang bebas dari kelas. Setiap orang mempunyai potensi sebagai intelektual, namun tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai fungsi intelektual. (Gramsci, 1971:1-2).

Lebih jauh, intelektual organik menurut Gramsci adalah kelompok sosial yang hadir di atas wilayah sebuah fungsi esensial dalam dunia produksi ekonomi yang menciptakan secara organik satu strata kelompok sosial atau lebih dari kaum intelektual yang memberinya homogenitas dan kesadaran pada fungsinya sendiri dalam bidang ekonomi dan sosial politik. Mereka perlu menciptakan kondisi-kondisi yang paling menguntungkan untuk perluasan kelas mereka. Mereka adalah sebuah kelas baru yang masuk ke dalam kalangan kaum terkemuka yang dalam konsep Mosca disebut *kelas politik*. Namun, bukan dalam pengertian sebagai intelektual kelompok sosial dominan, melainkan elite dalam konsep Pareto, yakni intelektual yang berfungsi dalam negara dan masyarakat (Gramsci, 1971:5-6).

Untuk mengetahui tipe-tipenya dalam kasus kepariwisataan Bali, intelektual organik dipilah menjadi dua, yakni konservatif dan progresif. Perbedaan mereka diketahui dari perlakuan terhadap tradisi leluhur bahwa yang satu ingin mempertahankan sambil memanfaatkannya untuk kepentingan pariwisata, sedangkan yang satu lagi ingin mengubahnya untuk memperbaiki peradaban Bali supaya tercipta praktik keagamaan yang lebih mengutamakan hakikat agama daripada ritual. Setiap intelektual organik memiliki simbol dan norma. Untuk mengorganisir mereka, demi mudahnya digunakan cara berpikir Kuntowijoyo, yang menyebutkan simbol dan norma dalam empat kategori sejarah, yakni tradisional, patrimonial, kapitalis, dan teknokratis. Kategori

sejarah kapitalis mempunyai simbol mitis dan norma individualis, sedangkan yang teknokratis simbolnya *pseudo-realis* dan normanya modifikasi perilaku (Kuntowijoyo, 1987:6). Dalam studi ini, kerangka berpikir itu dimodifikasi sehingga melahirkan empat kategori intelektual organik, yakni tradisional, patrimonial, kapitalis, dan teknokratis. Dengan adanya modifikasi itu, intelektual organik kapitalis bisa pula diartikan orang bukan semata-mata menjunjung simbol realis dan norma individualis, namun juga yang berpikir, bertindak, dan berkata untuk memperbesar kapital.

### **PELUANG DAN TANTANGAN PARIWISATA BALI**

Pada Maret 1969 Bank Dunia datang ke Indonesia. Mereka menyarankan supaya Indonesia mau membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bali. Pemerintah Indonesia memenuhi saran itu, lalu memesan penyusunannya kepada SCETO, *Société Centrale pour l'Équipement Touristique Outre-Mer* (Picard, 2006:64). Di balik peristiwa itu tersembunyi relasi-relasi kekuasaan antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang secara implisit terungkap dalam pidato Presiden Soeharto saat peresmian Lapangan Terbang International Ngurah Rai tanggal 1 Agustus 1969. Dalam pidato itu, ia mengatakan bidang kepariwisataan diharapkan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan Pelita I (*Suluh Marhaen*, 2 Agustus 1969:1).

Sama seperti Pelita I, dalam Pelita II (1974-1979) pembangunan pariwisata tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan dipusatkan pada beberapa daerah, terutama Bali. Selanjutnya, kegiatan pariwisata akan ditingkatkan secara bertahap ke daerah lain dengan cara memanfaatkan daya tarik Pulau Bali. Khusus Bali, inti pokok pengembangan pariwisata adalah konsentrasi tempat penginapan di Nusa Dua, Sanur, dan Kuta (*Bali Post* 14 Januari 1974:1). Untuk menyukseskan Pelita II, pemerintah meminta semua hotel dapat menjalankan tugasnya sebagai penunjang kehidupan industri rakyat setempat (*Bali Post*, 7 Februari 1974:1)

Sesuai dengan program yang dicanangkan, awal Pelita II diisi dengan berbagai kegiatan untuk mendukung pengembangan pariwisata Bali. Hal itu terlihat dari keputusan pemerintah melaksanakan program yang ditawarkan SCETO, antara lain, mendirikan lembaga pengembangan pariwisata yang disebut BTDB (*Bali Tourism Development Board*), membangun infrastruktur pariwisata di Bali Selatan, tepatnya di Pulau Nusa Dua (*Bali Post*, 25 Februari 1974:1) Pada akhir bulan Februari 1974, Pemerintah Indonesia mengadakan pembicaraan dengan World Bank mengenai pemberian kredit infrastruktur, terutama jalan menuju hotel di Nusa Dua (*Bali Post*, 7 Februari 1974:1).

Demi suksesnya program itu, Dirjen Pariwisata MJ Pangestu mengharapkan, kendatipun infrastruktur belum selesai hendaknya para penanam modal sudah mulai membangun hotel di Nusa Dua. Bukan hanya untuk penanam modal, prioritas untuk warga lokal Bali pada umumnya juga diberikan pada pengadaan tenaga kerja. Untuk pendidikan tenaga kerja, sesuai dengan Masterplan Kepariwisata Bali, akan ditindaklanjuti kemudian melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan ILO dan dibantu oleh Bank Dunia (*Bali Post*, 7 Februari 1974:1).

Pemerintah juga mempersiapkan sumberdaya manusia di bidang pariwisata, terlihat dari terbentuknya asosiasi pramuwisata Bali, Bali Guide's Association. Asosiasi ini diresmikan tanggal 15 Februari 1974 di Gedung DPRD Badung (*Bali Post*, 18 Februari 1974:1). Persiapan sumberdaya manusia lebih jauh dilakukan dengan cara menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk menyongsong kehadiran industri pariwisata, salah satunya adalah "Training on Regional Development Planning ke VI" yang berlangsung di Wisma Werdhapura Sanur tanggal 26 Februari 1974," (*Bali Post*, 5 Februari 1974:1).

Demi suksesnya pariwisata, pemerintah juga menyelenggarakan Workshop PATA (*Pacific Area Travel Association*) ke-23 di Indonesia. Kegiatan ini terdiri atas lokakarya yang diselenggarakan di Bali dan konferensi di Jakarta. Lokakarya PATA diselenggarakan tanggal 28 dan 29 Maret 1974 di Hotel Bali Beach, Sanur. Berbagai kegiatan

pendukung dilakukan demi suksesnya pelaksanaan kedua acara itu. Salah satu yang terpenting adalah promosi besar-besaran di media massa, seperti radio, televisi, dan surat kabar. Di Bali, demi suksesnya PATA, pemerintah juga mempersiapkan tempat penampungan para peserta, memperbaiki objek-objek wisata, pengadaan *open stage*, serta fasilitas atau sarana penunjang lainnya (*Bali Post*, 13 Februari 1974:3).

Persiapan penampungan para peserta PATA antara lain dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada pengusaha hotel lokal untuk meminjam uang di bank. Hal itu dimanfaatkan oleh sejumlah pemilik hotel di Sanur, antara lain Santrian Beach Village, Gazebo, Irama, Segara Village untuk memperbaiki fasilitas hotelnya masing-masing (wawancara dengan Ida Pedanda Gede Dwija Ngenjung, 22 Februari 2012). Dengan tujuan yang sama menyukseskan PATA, pemerintah juga mendirikan hotel besar berbintang lima yakni Hotel Sanur Beach dan Hotel Bali Hyatt (*Bali Post*, 25 Februari 1974:1). Menjelang lokakarya PATA, di saat pengecekan terakhir, 14 hotel menyatakan siap menampung peserta, yakni Hotel Bali Beach, BSSC, Hyatt Hotel, Sindhu Beach, Hotel Segara Village, Hotel Mars, Hotel Gazebo, Hotel Diwangkara, Hotel Puri Dalem, Satrian Beach Cottage, Hotel Irama Bungalow, Alit's Beach Bungalow, Hotel Tanjung Sari, dan Mars Bungalow (*Bali Post*, 11 Februari 1974:1).

Setelah Konferensi PATA berlalu, terutama memasuki tahun 1976, seperti disebutkan di atas, terjadi kemandekan industri pariwisata yang berlangsung selama satu dekade. Di tengah-tengah kemandekan itu, muncul berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pariwisata, antara lain komersialisasi upacara *Ekadasarudra*, pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB), layang-layang, dan pawai ogoh-ogoh. Kegiatan itu dapat disebut sebagai respons pemerintah terhadap tantangan kemandekan pariwisata Bali. Akan tetapi, tidak semua jenis kegiatan itu dibicarakan dalam tulisan ini. Komersialisasi upacara *Ekadasarudra* dan pelaksanaan PKB kiranya sudah cukup dipakai

untuk memberikan gambaran adanya relasi-relasi kekuasaan di balik pengelolaan pariwisata Bali.

## **MEMANFAATKAN UPACARA EKADASARUDRA UNTUK PARIWISATA**

Pada awal tahun 1960-an pemerintah daerah Bali menyelenggarakan upacara *Mancawalikrama* yang kemudian berlanjut dengan *Ekadasarudra* tahun 1963. Menurut Adrian Vickers, inisiatif penyelenggaraan upacara itu datang dari Raja Klungkung, Dewa Agung (Vickers, 1989:227). Pendapat Vickers mengesankan kedua upacara itu tidak mempunyai tali temali. Pikiran yang serupa terlihat pula pada Anthony Forge, yang berpendapat bahwa upacara *Ekadasarudra* diselenggarakan karena sudah begitu lama, lebih dari seratus tahun tidak dilaksanakan lagi dan karena situasi yang sangat buruk selama beberapa waktu sebelumnya sehingga diperlukan suatu upacara penyucian (Forge, 1980:227).

Pendapat yang nyaris serupa terlihat pula pada David J. Stuart Fox, yang menyebutkan beberapa faktor di balik munculnya upacara *Ekadasarudra*, yaitu antara lain pemisahan Bali dari bagian wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958 dan status agama Hindu sebagai agama yang diakui oleh pemerintah (Stuart-Fox, 1991:36-37). Sementara itu, J. Stephen Lansing menghubungkan pelaksanaan upacara itu dengan sejumlah petaka yang terjadi sebelum tahun 1963, yaitu penaklukan Belanda atas Kerajaan Badung dan Klungkung, pendudukan tentara Jepang, perjuangan kemerdekaan, meluasnya korupsi, dan kehancuran ekonomi sesudah zaman kemerdekaan (Lansing, 1983:116)

Tidak ada satu pun peneliti di atas yang mencari latar belakang pelaksanaan upacara *Ekadasarudra* pada proses penyucian kembali pulau Bali sebagai akibat dari adanya penanaman tumbal di Pura Besakih yang dilakukan oleh Eyang Gusti Aji dari Yogyakarta. Penanaman tumbal itu diketahui oleh I Gusti Ananda Kusuma, seorang anggota DPRD Tingkat I Bali. Ia melihat sebuah bangunan aneh berupa sebuah tugu di belakang *padmatiga*, yakni tempat pemujaan

Tuhan dalam manifestasinya sebagai Brahma, Visnu, dan Isvara (“Surat I Gusti Anandakusuma, Kepada Yth. Sdr. Ketua DPRD Daerah Tingkat I Bali di Bali.”).

Setelah dibongkar, tugu itu ternyata merupakan tanda dari tempat penanaman sebuah tumbal. Sebagai akibat dari penanaman tumbal itu, sejumlah intelektual tradisional berkata bahwa Bali harus disucikan dengan upacara *Mancawalikrama* dan *Ekadasarudra*. Tata cara pelaksanaan upacara *Mancawalikrama* mengacu upacara sejenis di Pura Besakih tahun 1933. Namun untuk *Ekadasarudra*, tidak ada satu pun orang yang dapat dijadikan sebagai narasumber, sebab upacara ini sudah empat abad lamanya tidak pernah terlaksana di Bali (Stuart Fox, 1991:278, 283).

Dengan demikian, sejak masa kolonial sudah berlangsung tiga kali upacara besar di Pura Besakih. Akan tetapi, ketiganya belum mampu mewujudkan kedamaian dan kemakmuran Bali seperti yang diharapkan. Tahun 1965/1966 terjadi pembantaian massal orang-orang PKI. Tahun 1974 sebuah pesawat terbang jatuh di Desa Grogak, Bali Utara, dan tahun 1977 terjadi gempa bumi di Bali Utara. Para intelektual organik tradisional patrimonial berpendapat petaka itu terjadi karena adanya kesalahan dalam penentuan tahun pelaksanaan upacara *Ekadasarudra*. Upacara itu terjadi 100 tahun sekali. Setelah dihitung-hitung, tahun pelaksanaan yang benar bukan 1963 melainkan 1979. Oleh karena itu, mereka mengusulkan upacara ulangan. Pelaksanaan *Mancawalikrama* akhirnya diulang kembali pada tahun 1978 dan setahun kemudian *Ekadasarudra* (Stuart Fox, 1991:337-344).

Pengetahuan yang tersembunyi dibalik ungkapan wacana *Ekadasarudra* kemudian ditanggapi oleh intelektual organik kapitalistik yang duduk atau berpengaruh dalam kepanitiaan, untuk dijadikan kekuasaan menyelamatkan pariwisata Bali. Kecenderungan itu terlihat jelas dari adanya proses komodifikasi dalam pelaksanaan *Ekadasarudra*. Menurut Anthony Forge (1980:227), komodifikasi *Ekadasarudra* sebenarnya sudah terjadi pada pelaksanaannya di tahun 1963, namun lebih meluas lagi di tahun

1979. Komodifikasi dalam pelaksanaan ulang itu setidaknya terlihat dalam dua hal, yaitu publikasi *Ekadasarudra* secara besar-besaran melalui media nasional maupun internasional (Stuart Fox, 1991:343) dan komersialisasi produksi film pelaksanaan upacara yang melibatkan orang asing (*Bali Post*, 5 Maret 1979:5).

Demikianlah salah satu contoh relasi-relasi kekuasaan di balik pengelolaan industri pariwisata Bali. Fenomena berikutnya yang dapat pula dijadikan sebagai bukti adanya relasi-relasi kekuasaan di balik pengelolaan industri pariwisata adalah pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB).

### **KEGIATAN PKB UNTUK MENARIK KUNJUNGAN WISATAWAN**

Pengetahuan yang tersembunyi di balik ungkapan wacana Pariwisata Budaya juga dijadikan kekuasaan oleh intelektual organik konservatif tradisional patrimonial untuk kepentingan kelompoknya. Jika dalam kasus *Ekadasarudra* mereka berasal dari anggota organisasi-organisasi keagamaan, dalam kasus PKB yang berkepentingan adalah kalangan seniman, terutama yang dari seni pertunjukan tradisional. Mereka mengolah kekuasaan yang berada di tangannya itu menjadi pengetahuan tentang pentingnya penggalian dan pengembangan kesenian Bali. Terjadi kemudian proses pereka-yasaan seni pertunjukan tradisional

Perekayasaan seni pertunjukan tradisional itu akhirnya melebur dikotomi budaya besar dan budaya kecil. Menurut Robert Redfield, seperti yang dikutip oleh Suhartono, budaya besar berpusat di keraton sedangkan budaya kecil di desa (*Humaniora*, Vol. 17, No. 3, Oktober 2005: 237). Tentunya dalam kasus Bali, budaya kecil memang bisa dikatakan berpusat di desa, namun budaya besar tidak mutlak harus diartikan hanya berpusat di keraton, tetapi juga pura, tempat beribadah. Keduanya bertemu di suatu tempat bernama Werdhi Budaya, *Art Centre*, melalui suatu acara yang disebut sebagai Pesta Kesenian Bali (PKB).

Demi terselenggaranya PKB, setiap tahun sejak awal kemunculannya hingga sekarang, pemerintah daerah Bali membentuk panitia de-

ngan anggaran operasional khusus. Pada dasarnya, anggota kepanitian PKB adalah intelektual organik konvensional teknokratis. Orang-orang yang sedang berada dalam kategori ini ingin menjadikan suatu proses simbolis, seperti halnya PKB sebagai usaha untuk melakukan perkeayaan sosial. Mereka ingin memodifikasi perilaku masyarakat melalui kegiatan PKB. Itulah sebabnya setiap tahun mereka membuat tema kegiatan yang diambil dari bahasa Jawa Kuno, sama seperti kecenderungan yang berlaku pada pemerintahan pusat pada saat ada perayaan atau peringatan suatu kegiatan penting.

Begitu PKB menjadi sebuah ungkapan wacana, pengetahuan yang tersembunyi di baliknya ditangkap oleh intelektual organik lainnya, baik yang tradisional patrimonial maupun kapitalistik. Dengan demikian, di dalam PKB terdapat relasi-relasi kekuasaan antarempat aliran intelektual organik, yakni tradisional-patrimonial, kapitalistik, dan teknokratis. Dari keempat aliran itu, yang tampak paling dominan adalah intelektual organik kapitalistik. Hal itu dapat dilihat dari sejarah kemunculan PKB.

Munculnya PKB tidak dapat dilepaskan dari adanya kemandekan industri pariwisata seperti disebutkan secara berulang di atas. Hal itu dapat dilihat pada tahun kemunculannya, yakni 1978. Hanya dua tahun setelah pariwisata Bali mulai mengalami kemandekan. Pada tahun yang sama juga dilangsungkan upacara besar di Pura Besakih seperti sudah disebutkan di atas. Berbeda dengan *Mancawalikrama* dan *Ekadasarudra* yang kemunculannya dipicu oleh adanya kesalahan dalam penghitungan tahun pelaksanaan sebelumnya (1963), kemunculan PKB bermula dari respons Gubernur Bali Ida Bagus Mantra terhadap Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/1978. Surat itu berisikan tentang aturan masa liburan sekolah nasional untuk seluruh tingkatan sekolah berlangsung selama 30 hari, berlaku mulai tanggal 18 Juni 1979. Aturan pelaksanaan SK tersebut di atas dituangkan dalam pedoman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Menteri Muda Urusan Pemuda. Dalam pedoman itu disebutkan selama masa libur sekolah anak-anak

agar diarahkan untuk meningkatkan kecintaan pada alam dan budaya Indonesia termasuk kebudayaan daerah (*Bali Post*, 17 Juli 1979:1).

Selanjutnya, intelektual organik konservatif tradisional-patrimonial yang terkagum-kagum pada proses simbolis zaman kerajaan menggunakan PKB sebagai ajang untuk mementaskan produk kesenian yang mengandung simbol mitis dan norma komunal-kepatuhan. Dengan bekal konsep itu, tanggal 20 Juni 1979 malam hari PKB dibuka yang dimeriahkan dengan pementasan Sendratari Ramayana kolosal (*Bali Post*, 19 Juni 1979:1). Setelah itu, sampai dengan 23 Agustus 1979 diselenggarakan apresiasi kesenian Bali, kecuali yang disakralkan.

Selain pementasan kesenian, berlangsung pula kegiatan ilmiah berupa sayembara mengarang, seminar perkembangan gamelan Gong Kebyar, diskusi nilai estetika arsitektur Bali, dan diskusi sastra daerah. Ada pula sejumlah pameran, seperti seni rupa, makanan tradisional, pakaian daerah, dan sejumlah aktivitas, yang merupakan manifestasi kehidupan kesenian Bali, (*Bali Post*, 20 Juni 1979, Tajuk Rencana:2), di antaranya sayembara mengarang lagu Bali populer, mencipta dan menabuh gamelan Gong *Semar Pegulingan*, serta penulisan, dan lomba foto kepariwisataan (*Bali Post*, 19 Juni 1979:1).

Dari semua jenis kegiatan di atas, yang tampak paling menonjol dalam kegiatan PKB adalah pertunjukan seni tari tradisional. Pengelolaannya mengacu tipologi seni tari yang dirumuskan oleh para seniman Bali pada tahun 1971. Pada saat itu, seni tari Bali diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu, *wali*, *bebali*, dan *bali-balihan* oleh para pengambil kebijakan seni saat itu antara lain I Gusti Ngurah Pindha, Raden Moerdowo, Anak Agung Made Dilantik, dan I Made Bandem (Wawancara dengan Kadek Suartaya, 3 Desember 2011).

Seni *wali* adalah seni yang hanya dipentaskan dalam upacara di pura tertentu. Seni *bebali*, yaitu tari semisakral yang dipentaskan dalam kaitannya dengan upacara adat tertentu dan *bali-balihan*, yaitu seni untuk hiburan dan dapat dipentaskan tanpa ada kaitannya dengan upacara adat dan agama (*Bali Post*, 23 Desember 2002).

Kesenian tipe pertama dan kedua, menurut Ida Bagus Mantra harus dilestarikan, sedangkan seni yang ketiga boleh dipentaskan di muka umum untuk membantu kehidupan masyarakat (Putu Setia, *Bali Post*, 13 September 1978:4).

Seni *bali-balihan* yang dipentaskan dalam acara PKB sangat beragam, namun ada empat jenis yang paling mampu menarik penonton lokal, yakni Sendratari Ramayana, drama gong, *gong kebyar*, dan Sendratari Mahabharata. Sendratari Ramayana kolosal pertama kali dipentaskan dalam acara pembukaan PKB tahun 1979 di panggung Ardha Candra Taman Budaya Bali, yang disaksikan oleh 10.000 orang penonton. Menurut Kadek Suartaya, Sendratari Ramayana pertama kali muncul di Bali tahun 1965, diciptakan oleh I Wayan Beratha untuk perayaan ulang tahun ke-5 Kokar Bali (I Made Bandem dan Fredrik Eugene deBoer, 2004:110). Setelah itu sendratari menjalar ke Bali dan tahun 1962 dikembangkan menjadi Sendratari Jayaprana oleh sebuah tim seniman Bali bekerja sama dengan Kokar Bali (Bandem dan deBoer, 2004:110).

Setelah ditilik asal-muasalnya, ternyata sebagian besar seni yang dipentaskan dalam PKB dapat disebut sebagai *invented tradition*. Salah satu contohnya adalah Sendratari Ramayana. Sendratari ini dipentaskan pertama kali pada tahun 1961 di pelataran Candi Prambanan, yang dibawakan oleh ratusan penari. Menurut Perlman seperti dikutip Wayan Dibia, Sendratari Ramayana yang dipentaskan di Candi Prambanan itu diciptakan oleh Letnan Jendral G.P.H. Djatikusumo sebagai tontonan wisatawan (Dibia, 1999:67).

Sendratari Ramayana Jawa itu kemudian diadopsi oleh seniman Bali, setelah melalui berbagai modifikasi, sehingga lahirlah Sendratari Ramayana Bali. Jadi, dengan memodifikasi konsepsi Eric Hobsbawm mengenai *invented tradition*, dapat dikatakan Sendratari Ramayana Bali adalah sebuah *invented art*, yakni seni yang ditemuipentaskan, dibangun, dan diwujudkan secara resmi, dan seni yang muncul dalam waktu relatif singkat yang dalam beberapa tahun saja dianggap sebagai tradisi yang mapan. Adanya

bentuk-bentuk *invented art* dalam PKB semakin memperkuat pendapat Adrian Vickers, bahwa "Bali adalah Sorga Yang Diciptakan" (Vickers, 1989).

Sebagai bagian dari *invented art*, dengan meminjam kerangka berpikir Eric Hobsbown, seni pertunjukan tradisional yang dipentaskan dalam PKB dapat dipandang sebagai kegiatan, umumnya diatur oleh peraturan-peraturan yang diakui secara tersurat maupun tersirat dan kegiatan yang bersifat ritualistik atau simbolis, yang bertujuan untuk menanamkan kelakuan-kelakuan tertentu dengan cara diulang-ulang, yang secara otomatis mencerminkan kesinambungan masa lampau di masa kini (Hobsbown and Terence (eds.), 1983:1-3)

*Invented art* sedapat mungkin, masih dengan mengikuti kerangka berpikir Eric Hobsbown, berusaha mendirikan kesinambungan dengan masa lalu yang dianggap cocok dengan masa kini. Akan tetapi, kesinambungan itu tidak berdasarkan kenyataan melainkan khayalan. Secara singkat, *invented art* adalah reaksi terhadap sesuatu yang baru yang berbentuk melihat kembali ke situasi-situasi masa lampau atau mendirikan masa lampau dengan cara pengulangan secara semi-wajib. Hal ini berlawanan dengan perubahan dalam pembaruan dunia modern yang tetap berjalan dan usaha untuk menyusun setidaknya beberapa bagian dalam kehidupan sosial dan dunia modern itu sebagai hal yang tidak berubah (Hobsbown and Terence (eds.), 1983:1-3).

*Invented art* yang dipentaskan dalam PKB dengan demikian memperkuat pendapat Mark Hobart yang menyatakan bahwa ide yang menyebutkan seni tari Bali merupakan suatu yang kuno, tersebar luas, terkenal, dan diwariskan dari masa lampau sebenarnya tidak lebih dari hasil sebuah fantasi. Menurut Hobart, sebelum penaklukan Bali dan munculnya kegiatan pariwisata tahun 1920 - 1930-an, relatif tidak ada seni dalam bentuk teater di Bali. Seni teater muncul setelah penjajah Barat dan wisatawan mengharapkan orang pribumi menari. Harapan itu dipenuhi secara cerdas dengan cara menciptakan sejumlah seni teater. Seni tari pun



mulai hidup sebagai fenomena internasional sebagai hasil pertemuan Barat dan Bali, terutama melalui pariwisata dan pameran internasional (Hobart, 2007:3).

Bukan hanya *invented art*, dalam PKB juga muncul proses komersialisasi seni yang dilakukan oleh intelektual organik kapitalistik. Jika pada awal kelahirannya, kekuasaan para intelektual organik konservatif tradisional-patrimonial cukup dominan, PKB tampak masih enggan menampilkan tari *wali* (sakral), namun kekuasaan intelektual organik kapitalistik begitu kuat mengakibatkan proses desakralisasi tari *wali* pun tak terhindarkan. Demi tidak berlanjutnya proses desakralisasi, pada tahun 1997 Gubernur Bali mengeluarkan surat keputusan yang mengatur seni pertunjukan untuk pariwisata. Akan tetapi, surat keputusan itu banyak dilanggar oleh pelaku pariwisata dan juga dalam PKB. Seni tari yang di daerahnya betul-betul disakralkan, dipentaskan dalam PKB sebagai seni *bali-balihan*, misalnya tari *Barong Brutuk* dan *Sanghyang*. Desakralisasi seni terjadi karena ada perbedaan interpretasi antara satu daerah dengan daerah lain mengenai seni sakral. Salah satu contoh, tari *janger* digolongkan seni *bali-balihan*, namun di salah satu desa di Bangli, tari *Janger Maborbor* sangat disakralkan (Bali Post Online, Senin 23 Desember 2002).

Bukan hanya intelektual organik kapitalistik yang berperan besar dalam proses perekrutan sosial dalam PKB, tetapi juga yang tradisional-patrimonial. Hal itu terlihat dalam pengadaan panggung kehormatan yang merupakan tempat duduk bagi para pejabat tinggi pusat maupun daerah pada saat menonton pawai acara pembukaan KB. Pawai diikuti oleh kontingen dari seluruh kabupaten/kodya dan partisipan dari luar daerah maupun luar negeri. Setiap kontingen wajib mempertontonkan atraksi di depan bawah panggung kehormatan. Para penonton berjejal di bawah panggung kehormatan untuk ikut menyaksikan atraksi itu.

Jejak-jejak keberadaan panggung kehormatan ternyata dapat dilacak pada zaman kolonial Belanda (Nyoman Wijaya, 2 Juli 2008), khususnya ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda

berkunjung ke Bali tahun 1918 dan 1925. Pada tahun 1918, setahun setelah meletusnya Gunung Agung, Gubernur Jenderal datang ke Bali. Walaupun rakyat Bali masih berada dalam kesusahan yang diakibatkan oleh bencana itu, dia disambut dengan sangat meriah di depan rumah Asisten Residen Bali Selatan. Lokasi penyambutan Gubernur Jenderal persis di tempat panggung kehormatan PKB di depan Gedung Jaya Sabha, rumah jabatan Gubernur Bali sekarang.

Lebih meriah lagi adalah sambutan yang diberikan kepada Gubernur Jenderal berikutnya yang datang ke Bali tahun 1925. Para pejabat lokal memerintahkan sejumlah gadis berbaris di sepanjang jalan yang akan dilaluinya sambil membawa *canang* (-sesaji berbentuk bunga). Hal yang serupa dapat pula dilihat dalam PKB, namun bedanya para gadis melakukan prosesi di depan panggung kehormatan. Di areal Pura Dalem Singaraja, Gubernur Jenderal disambut oleh para gadis dewasa yang memperagakan cara-cara melaksanakan ritual keagamaan seperti *makidung* (menyanyikan tembang) dan cara wanita Bali mengenakan pakaian berwarna keemasan. Saat menuju Rumah Kerajinan, dia diperlihatkan kain tenun, perkakas, dan cara membuatnya (*Bali Adnjana*, No. 17, Rebo Pon 1 Juni 1925, Tahoen II:1-6).

Duplikasi cara-cara penyambutan Gubernur Jenderal itu ditemukan pula dalam areal PKB, seperti terlihat dari adanya ruangan khusus untuk memamerkan sekaligus menjual barang-barang hasil perajin dari seluruh Bali. Keberadaan ruangan khusus itu jelas merupakan hasil modifikasi intelektual organik kapitalistik dengan berpijak pada cara-cara penguasa lokal menyambut kedatangan Gubernur Jenderal di zaman kolonial Belanda. Sebagai sebuah tanda mata, Gubernur Jenderal diberikan selebar taplak meja yang terbuat dari kain songket dan sebuah asbak (*Bali Adnjana*, No. 17, Rebo Pon 1 Juni 1925, Tahoen II:1-6).

Ketika sampai di Desa Munduk, Buleleng, Gubernur Jenderal disambut oleh beberapa puluh gadis remaja berpakaian warna keemasan, berdiri berjejer dengan teratur. Di Bangli dia disambut dengan meriah. Di Denpasar dia dijemput

oleh kontrolir dan pegawainya serta pengiringnya dengan upacara meriah pula. Beratus-ratus orang di Denpasar membawa bendera dan beribu-ribu penonton berdesak-desakan untuk melihat wajahnya. Gubernur Jenderal juga disambut dengan acara *maped*, prosesi dan arak-arakan *adrah*, kesenian khas Islam. Di Pura Museum Denpasar, dia diperlihatkan barang-barang kesenian yang indah-indah. Di alun-alun Kota Denpasar, dia disuguhkan beberapa pertunjukan, seperti *Legong* dan *Arja* (*Bali Adnjana*, No. 17, Rebo Pon 1 Juni 1925, Tahoen II:1-6).

Di daerah perbatasan Klungkung dan Karangasem, beratus-ratus orang berdiri teratur sambil memegang bendera Belanda dan tombak menyambut kedatangan Gubernur Jenderal. Di setiap desa dipancarkan *penjor*. Menjelang masuk Kota Karangasem, sejumlah anak berpakaian serdadu berdiri sambil mengibarkan bendera tanda kehormatan. Di depan Istana bekas Kerajaan Karangasem, dibangun sebuah pintu gerbang hiasan. Di dalam istana, persis di depan tempat duduknya, sejumlah perajin, antara lain tukang kayu, emas, dan tenun, memperagakan kemahiran masing-masing (*Bali Adnjana*, No. 17, Rebo Pon 1 Juni 1925, Tahoen II:1-6). Peragaan keahlian para perajin sering dijumpai di hotel-hotel, pada pameran pembangunan zaman Orde Baru, dan parade dalam PKB.

Sepanjang jalan dari pintu luar sampai ke dalam istana, tempat penjamuan berlangsung, berdiri sejumlah perempuan mengenakan pakaian warna keemasan. Di Gianyar, sepanjang jalan menuju Pura Tirta Empul dihiasi *penjor* dan sejumlah perempuan berdiri sambil menjunjung sesajen, diselingi pembawa tombak dan bendera. Di istana bekas Kerajaan Gianyar, Gubernur Jenderal disambut dengan dentuman meriam, dijemput oleh panitia lalu diiringkan ke dalam istana. Di dalam istana, beberapa orang *pedanda* (pendeta Siwa) mengucapkan mantram *Weda* dan sejumlah tukang tenun, ukir, dan sebagainya, memperagakan keahliannya masing-masing. Gubernur Jenderal pun dijamu di sebuah bangunan bercorak Bali, penuh ukiran dan bersepuh prada emas. Di latar bawah, lebih

rendah dari serambi rumah, dua orang *pedanda* duduk di atas balai sedang *mapuja* (melantukan mantram). Di istana bekas kepenggunaan Ubud, dia disambut oleh *punggawa* setempat, keluarga dan para abdi, langsung diiringkan ke kuil milik keluarga bangsawan itu. Di sebuah *bale piasan* (tempat pendeta memimpin upacara), tersedia kursi meja dan lain-lain peralatan untuk menjamu Gubernur Jenderal (*Bali Adnjana*, No. 17, Rebo Pon 1 Juni 1925, Tahoen II:1-6).

Uraian di atas menunjukkan bahwa intelektual organik konservatif dari beberapa kategori sejarah telah menangkap pengetahuan yang tersembunyi dalam ungkapan wacana Pariwisata Budaya sebagai kekuasaan yang kemudian diimplementasikan dengan menyelenggarakan PKB. Setelah menjadi ungkapan wacana, pengetahuan yang tersembunyi dalam wacana PKB juga dijadikan kekuasaan oleh intelektual organik konservatif dari berbagai kategori sejarah untuk kepentingan mereka masing-masing. Dengan demikian, di dalam PKB ditemukan sejumlah relasi kekuasaan, antara orang-orang yang ingin mempertahankan proses simbolis, terutama seni peninggalan zaman kerajaan, orang-orang yang ingin memperoleh manfaat ekonomis dari kegiatan itu, dan yang ingin menggunakan proses simbolis dalam sajian PKB sebagai media untuk memodifikasi perilaku.

Demikianlah sudah dijelaskan dua contoh fenomena kuatnya relasi-relasi kekuasaan di balik pengelolaan industri pariwisata. Hal itu merupakan akibat dari gagalnya perlawanan intelektual organik progresif yang antara lain disebabkan oleh kuatnya dukungan kaum akademisi terhadap praktik ungkapan wacana Pariwisata Budaya, seperti dijelaskan di bawah ini.

## **MENKRITIK DAN MEMBELA PARIWISATA BUDAYA**

Seperti sudah disebutkan dalam jawaban pertanyaan penelitian pertama, pengetahuan yang tersembunyi di balik ungkapan wacana Pariwisata Budaya ternyata ditangkap oleh para intelektual organik tradisional-patrimonial, lalu dijadikan kekuasaan untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali upacara keagamaan di

zaman Kerajaan Gelgel. Hal itu mengakibatkan modernisasi agama yang sudah dimulai sejak tahun 1920-an dan memuncak tahun 1950-an, akhirnya tidak membuahkan hasil di tahun 1970-an. Hal itu terungkap dalam pemikiran seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada asal Bali pada tahun 1972. Ia mengaku heran dengan sikap para pimpinan agama yang hanya menekankan ritual sehingga agama Hindu tidak lebih dari sebuah spirit kosong (“Surat Naya Sudjanaputra d.a. Asrama Saraswati, Djl. Mawar 1, Jogjakarta, 7 Februari 1972).

Masih pada tahun yang sama 1972, ada pula yang berpendapat agama Hindu di tahun 1970-an berada dalam tingkatan terendah, bersifat primitif, karena kuatnya pengaruh latar belakang sejarah kebudayaan Bali maupun Jawa sebelum terkena pengaruh India yang bersifat primitif. Sebagai akibatnya, agama Hindu menjadi tidak memiliki dogma sehingga ada yang bersembahyang kepada nenek moyang, roh-roh jahat, para *sanghyang* (personifikasi Tuhan), dan sebagainya (I Gusti Rai Anandakusuma, “Perspektif Hari Depan Pulau Bali”). Hal itu mengakibatkan agama Hindu di Bali di awal tahun 1970-an tidak dapat disamakan dengan yang ada di India. Orang Bali Hindu mengaku memiliki *Veda* yang bagi orang Hindu India sudah dikategorikan sebagai *Veda* klasik dan harus disimpan di museum. Selain itu, orang Bali Hindu tidak mengenal *Upanisad* yang pada tahun 1970-an justru sangat penting artinya bagi umat Hindu di India. Sementara itu, di Bali hanya dikenal *Brahmanas*. *Upanisad* yang sudah mencapai tingkatan filosofi tinggi itu, dalam beberapa hal bertentangan dengan *Brahmanas* yang lebih mengutamakan ritual (I Gusti Rai Anandakusuma, “Perspektif Hari Depan Pulau Bali”)

Filosofi agama Hindu di Bali juga sangat rendah karena hanya dapat dicapai melalui kurban. Dengan demikian, menurut I Gusti Rai Anandakusuma, agama Hindu di Bali kehilangan pengemudi jiwa ke arah kesempurnaan sehingga menjadi agama yang sangat materialistis dan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang kaya. Agama Hindu akhirnya hanya memperkaya orang yang sudah kaya dan memiskinkan orang-

orang yang miskin karena adanya sesaji yang megah-megah dengan menghabiskan uang bernilai ribuan rupiah. Atas dasar itu, I Gusti Rai Anandakusuma menyarankan agama Hindu Bali ditinjau ulang (I Gusti Rai Anandakusuma, “Perspektif Hari Depan Pulau Bali”).

Semua kritikan yang disebutkan di atas tidak sampai memengaruhi sikap intelektual organik konservatif yang duduk dalam kepengurusan majelis tertinggi umat Hindu, Parisada Hindu Dharma (sekarang PHDI). Demi menyukseskan Pelita I, PHDI tetap menerjemahkan agama Hindu sebagai ritual karena dengan cara itu kesinambungan industri pariwisata Bali tetap terjaga. Di sisi lain, dengan cara itu, agama Hindu dapat dilestarikan, ditegakkan, atau dipertahankan di tengah-tengah laju industri pariwisata dan modernisasi. Sebagai konsekuensi atas sikap itu, kepemimpinan atau kepengurusan PHDI akhirnya selalu dipegang oleh orang-orang yang sepakat agama Hindu adalah ritual, bukan filsafat. Penguasaan sepihak itu mengakibatkan keputusan-keputusan keagamaan yang melibatkan umat, akhirnya dikuasai oleh sekelompok orang yang cenderung berpaham konservatif terhadap agama Hindu.

Demikianlah, sedikit contoh bentuk perlawanan para intelektual organik progresif terhadap kecenderungan PHDI mengutamakan ritual daripada filsafat agama demi kepentingan industri pariwisata. Akan tetapi, perlawanan mereka dikalahkan oleh pembelaan Philip Frick McKean, seorang antropolog asal Amerika Serikat yang mengajar di Universitas Udayana, Bali. Apakah McKean adalah orang yang disusupkan oleh Bank Dunia dan pemerintah pusat untuk membenarkan praktik industri pariwisata di Bali? Tampaknya kecenderungan ke arah itu ada, mengingat saat itu hasil penelitian orang asing relatif lebih dapat dipercaya daripada orang lokal. Dalam hal itu, ada kecenderungan para intelektual bahkan kaum akademisi di negara-negara berkembang merasa imperior jika sedang berhadapan dengan akademisi asing apalagi dari Amerika Serikat.

Pembelaan Philip Frick McKean terhadap pariwisata Bali sudah dilakukannya pada tahun

1971. Saat itu McKean mengatakan pengaruh pariwisata sudah terasa di Bali, yang antara lain terlihat dari banyaknya patung yang diukir secara kasar sekali; persahabatan antara orang-orang Bali dengan turis menjadi berdasarkan uang; anak-anak kecil mulai meminta uang kepada setiap turis asing karena menganggap mereka sebagai orang-orang kaya; kebudayaan Bali bukan lagi sebagai persembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada leluhur, melainkan sebagai persembahan kepada wisatawan. Biar-pun demikian, namun pengaruh pariwisata belum membahayakan budaya Bali (McKean, 1975).

Selanjutnya, pada tahun 1973 McKean berpendapat, peningkatan jumlah wisatawan ke Bali tidak merusak, tetapi justru sebaliknya akan memperkuat ikatan orang-orang Bali pada tradisi budayanya. Ia pun menolak tesis yang menyatakan bahwa suatu sistem budaya dari para wisatawan yang lebih kuat akan meresap dalam suatu sistem budaya yang lebih lemah sehingga akan terjadi perubahan-perubahan budaya yang selanjutnya akan menimbulkan perusakan tradisi-tradisi lokal seperti timbulnya penyeragaman dan hilangnya identitas etnis penduduk-penduduk daerah. McKean justru berpikir sebaliknya, bahwa orang-orang Bali memiliki kemampuan bukan hanya dalam melestarikan tetapi juga mempertegas identitas budayanya dihadapan wisatawan (McKean, 1975).

Kekayaan yang diperoleh dari pariwisata, menurut McKean, tidak hanya dipakai untuk mendorong meningkatkan kreativitas seni budaya, tetapi sekaligus juga memberikan perhatian kepada berbagai tradisi yang hampir punah. Orang Bali mampu memanfaatkan rasa kagum wisatawan untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan terhadap budaya Bali. Dengan cara demikian, menurut McKean pariwisata menjadi berperan ganda, yakni sebagai sumber keuntungan dan prestise. Selain itu, wisatawan juga dijadikan sebagai pelindung sehingga perannya cukup besar bukan hanya dalam pelestarian, tetapi juga penggalan kembali budaya Bali yang hampir hilang. Sambil melestarikan budaya, menurut McKean, orang-orang Bali mengembangkan dirinya menjadi manusia modern dengan

cara menggunakan uang dari pariwisata (McKean, 1975). Pendapat McKean ini, sejalan dengan hasil penelitian dampak sosial budaya pariwisata yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana yang menyebutkan bahwa pengaruh pariwisata tidak begitu besar dalam masyarakat Bali (Picard, 1997:87).

Pada tahun 1974, I Gusti Ngurah Bagus, seorang antropolog dari Universitas Udayana memperkuat kesimpulan McKean, bahwa industri pariwisata tidak hanya mengarah pada hal-hal yang negatif, namun banyak juga yang positif, yang bermanfaat bukan saja bagi masyarakat di Bali, tetapi juga Indonesia. Pengaruh positifnya, menurut Ngurah Bagus, bukan hanya berupa pembukaan lapangan kerja, meningkatnya penghasilan masyarakat, tetapi juga perkembangan dan pemeliharaan kebudayaan Bali. Para wisatawan membutuhkan sesuatu yang khas Bali telah merangsang munculnya kreativitas dan loyalitas (Bagus (ed.), 1975).

Dukungan McKean dan I Gusti Ngurah Bagus secara tidak langsung dijadikan sebagai pembenar pengelolaan industri pariwisata melalui ungkapan wacana Pariwisata Budaya. Sesuai dengan substansinya, pariwisata Bali benar-benar menjadikan kebudayaan sebagai daya tarik utamanya. Salah satunya dapat dilihat dari cara pemerintah mempromosikan Konferensi PATA tahun 1974. PATA dipromosikan bukan dengan cara hanya memasang spanduk dan baliho disertai reklame di media massa, tetapi juga menggunakan simbol-simbol agama Hindu salah satunya *penjor*. *Penjor* adalah sebatang bambu yang dihias dengan hasil-hasil pertanian sebagai simbol ucapan terimakasih kepada Hyang Widhi, Tuhan atas anugrahnya dalam memberikan sumber kehidupan. Rakyat di pedesaan pun disuruh memasang *penjor* dan menabuhkan gamelan untuk menyambut PATA (Wijaya, 2001:267). Dengan demikian, pemerintah benar-benar meniru cara-cara penyambutan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika berkunjung ke Bali seperti sudah dijelaskan di atas.

Sama juga halnya saat penyambutan kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pada saat menyambut PATA, pemerintah daerah

juga melibatkan rakyatnya dalam berbagai atraksi. Di Bangli, misalnya, rakyat disuruh melakukan *yasa* (bekerja secara baik) selama dua belas hari mulai tanggal 26 Maret hingga 7 April 1974 untuk memohon *kertha raharjaning jagad* (kesejahteraan semesta alam). Pemanfaatan agama untuk kepentingan ritual lebih jelas lagi terlihat ketika dilakukan persembahyangan di sekitar Pura Kehen, Batur, dan Pura Bukit Penulisan mulai pukul 13.00 hingga pukul 17.00 untuk memohon kesuksesan PATA. Lebih jauh lagi, Bupati Bangli Cokorda Gde Ngurah meminta kepada setiap banjar supaya anggotanya berjalan beriringan sepanjang jalan menuju pura dengan menggunakan pakaian adat khas daerahnya (Wijaya, 2001:267).

Demikianlah, pembelaan secara akademis yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat yang didukung oleh ilmuwan lokal terkemuka memperkuat kekuasaan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata budaya dan selanjutnya memberikan peluang kepada intelektual konservatif dari berbagai kategori sejarah untuk mewujudkan kepentingan masing-masing melalui pariwisata seperti yang sudah disebutkan di atas.

## SIMPULAN

Jawaban dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini menunjukkan memang ada relasi-relasi kekuasaan di balik pengelolaan industri pariwisata Bali. Relasi kekuasaan itu tidak bersifat sentralistik bahwa Gubernur Bali ingin memberikan yang terbaik kepada pemerintah pusat, melainkan ada di mana-mana. Artinya, industri pariwisata Bali menjadi tempat menerima dan mempraktikkan kuasa dan praktik itu dilihat sebagai sebuah kebenaran oleh berbagai pihak. Dalam pengelolaan kekuasaan itu terlihat adanya disposisi, manuver, taktik, dan teknik para intelektual organik konservatif dari berbagai aliran untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Namun relasi kekuasaan yang ditemukan di dalamnya tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan sebuah terobosan baru, misalnya menghidupkan kembali suatu bentuk upacara keagamaan yang nyaris punah seperti halnya pelaksanaan upacara *Ekadasarudra*.

Relasi kekuasaan dalam pengelolaan industri pariwisata Bali juga terlihat dari keberhasilan sejumlah intelektual organik konservatif memberikan ruang pementasan dan penggalian sejumlah *invented art*. Atas keberhasilan itu relasi kekuasaan menjadi bersifat produktif, setidaknya mampu memberikan ruang pentas bagi sejumlah bentuk *invented art*. Pementasan itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga mengesankan semua bentuk kesenian yang terangkum di dalamnya seolah-olah asli Bali. Padahal, di dalamnya ada setidaknya suatu bentuk kesenian, seperti halnya Sendratari Ramayana yang diadopsi dari hasil karya seniman Jawa. Namun, kemampuan seniman Bali dalam memodifikasi dan memberikan nuansa lokal menjadikan sendratari serapan itu, betul-betul nampak asli Bali.

Berkembangluasnya relasi-relasi kekuasaan seperti tersebut di atas dalam pengelolaan industri pariwisata Bali disebabkan oleh kegagalan intelektual organik progresif Bali angkatan 1970-an melakukan perlawanan terhadap disposisi, manuver, taktik, dan teknik para intelektual organik konservatif yang memiliki hak berbicara atau mengambil keputusan dalam menyusun bentuk pelaksanaan agama. Demi kepentingan pariwisata, para intelektual organik konservatif yang mendapat dukungan dari kaum akademisi terkemuka di zamannya membenarkan pengelolaan industri pariwisata yang berbasis tradisi sebagai salah satu cara untuk memberdayakan Bali. Dukungan para intelektual organik konservatif dan akademisi tertemuka itu menjadikan pengelolaan industri pariwisata Bali akhir 1970-an sarat dengan relasi kekuasaan seperti dipaparkan secara menyeluruh dalam studi ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antara Konta, A.A. Alit. 1979. "Menyambut Karya Agung Eka Dasa Rudra (1)" dalam *Bali Post*, 5 Maret.
- Anonim. 1925. "Bali dan Belanda", dalam *Bali Adnjana*, No. 17, Rebo Pon I Juni 1925, Tahoen I.
- Anonim. 1965. "Pengaruh Tourisme terhadap Kebudayaan Mendjadi Objek Research" dalam *Suara Indonesia*, 19 Djuni 1965.
- Anonim. 1969. "Bali Airport International Ngurah Rai Dibuka Presiden Suharto: Manfaatkan bagi Kemajuan

- dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat” dalam *Suluh Marhaen*, 2 Agustus.
- Anonim. 1974. “Pembangunan Daerah Pariwisata dengan Titik Berat Pengembangan Pariwisata” dalam *Bali Post* 14 Januari.
- Anonim. 1974. “Cheking Persiapan PATA : 600 Peserta PATA Sudah Tercatat” dalam *Bali Post* 7 Februari 1974.
- Anonim. 1974. “Ikatan Pramuwisata Bali Dibentuk,” *Bali Post* 18 Februari.
- Anonim. 1974. “Pelita II Menuntut : “Orientasi Sikap Mental bagi Suksesnya Pembangunan” dalam *Bali Post* 5 Februari.
- Anonim. 1974. “Pelita II Menuntut : “Orientasi Sikap Mental bagi Suksesnya Pembangunan,” *Bali Post* 5 Februari.
- Anonim. 1974. “Proyek Nusa Dua Digarap Pelita II: 23 Pemilik Tanah Belum Terima Ganti Rugi,” *Bali Post* 25 Februari.
- Anonim. 1974. “Persiapan Loka Karya PATA : “14 Hotel Dinyatakan Siap”, *Bali Post* 11 Februari 1974.
- Anonim. 1979. “Pesta Kesenian Bali Dibuka 20 Juni, Liburan Sebulan, Mau Diapakan?,” *Bali Post*, 17 Juli.
- Anonim. 1979. “Besok Dibuka Pekan Kesenian Bali, Sore Hari Ini Parade Drumband dan Pakaian Kesenian Tradisional,” *Bali Post*, 19 Juni.
- Anonim. 1979. “Pesta Kesenian Bali,” *Bali Post*, 20 Juni, Tajuk Rencana.
- Anonim. 2002. “Soal Perda Kesenian Tak Berguna Jika Berorientasi Profit,” *Bali Post Online*, Senin, 23 Desember, *download*, 17 Agustus 200 melalui <http://www.google.co.id/>
- Bagus, I Gusti Ngurah (ed.). 1975. *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*. Denpasar: tanpa penerbit.
- Bandem, I Made dan Fredrik Eugene deBoer. 2004. *Kaja dan Kelod Tarian Bali dalam Transisi*, terjemahan I Made Marlowe Makaradhwa. Yogyakarta: Badan Penernit Insitut Seni Indonesia.
- Dibia, I Wayan. 1999. *Selayang Pandang Seni Pertunjukan Bali*. Denpasar: Masyarakat Seni Pertunjukan dan Arti.Line.
- Dokumen. “Surat I Gusti Ananda Kusuma, Kepada Yth. Sdr. Ketua DPRD Daerah Tingkat I Bali di Bali.”
- Dokumen. “Surat Naya Sudjanaputra d/a Asrama Saraswati, Djl. Mawar 1, Jogjakarta, 7 Februari 1972, Kepada Bapak Wedastera Suyasa”.
- Dokumen. Rai Anandakusuma, I Gusti, tt. “Perspektif Hari Depan Pulau Bali.”
- Forge, Anthony: 1980: “Balinese Religion and Indonesian Identity,” dalam *Indonesia: Australian Perspectives*, J.J. Fox, R.G. Garnaut, P.T. McCawley, J.A.C. Mackie, ed. Canberra: Research School of Pacific Studies The Australian National University.
- Foucault, Michel, 1980. *Power/Knowledge*, Colin Gordon, ed., trans. Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham, Kate Soper. Sussex: The Harvester Press.
- Gramsci, Antonio, 1971. *Slection From The Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publisher.
- Hobart, Mark. 2007. “Rethinking Balinese Dance, Special Edition on Indonesian Performing Arts Indonesia and the Malay World,” 35: 101, March.
- Hobsbown, Eric and Terence Ranger (eds.). 1983. *The Invention of Tradition* Cambridge: Cambridge University Press.
- Kebung, Konrad, 2002. “Kembalinya Moral melalui Seks” dalam *Basis*, No. 01 – 02, Tahun Ke- 51, Januari-Februari.
- Kuntowijoyo, 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Lansing, J. Sephen . 1983. *The Three Worlds of Bali*. New York: Praeger Publisher.
- McKean, Philip. 1975. “Analisa Pendahuluan tentang Interaksi Orang Bali dengan Wisatawan: Tradisi Kecil, Besar, dan Modern dari Suatu Kebudayaan” dalam *Bali Dalam Sentuhan Pariwisata*, I Gusti Ngurah Bagus, ed. Denpasar: Tanpa Penerbit.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, terj. Jean Couteau dan Warih Wiratsana. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-Forum Jakarta-Paris.
- Philpott, Simon, 2003, *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, terj. Nuruddin Mhd. Ali, Uzair Fauzan. Yogyakarta: LKIS.
- Setia, Putu. 1978. “Perlu kah Bali Menyelenggarakan Jambore Seni,” dalam *Bali Post*, 13 September.
- Sokardi, Gusti, 1974. “Bali dan PATA – 74 Makna Tuan Rumah yang Baik” *Bali Post* 13 Februari.
- Stuart-Fox, David J. 1991. “Pura Besakih: Temple-state Relations from Precolonial to Modern Times” in *State and Society in Bali*, Hildred Geertz, ed. Leiden: KITLV.
- Vickers, Adrian, 1989. *Bali a Paradise Created*. California: Periplus.
- W. Pranoto, Suhartono. 2005. “Budaya Daerah dalam Era Desentralisasi,” dalam *Humaniora* Volume 17, No. 3, Oktober.
- Wijaya, Nyoman. 2001. *Biografi Si Pengembala Itik John Ketut Pantja, Pengalaman dan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Nyoman. 2008. “Membongkar “Mitos” PKB untuk Mencapai Keseimbangan dan Keharmonisan Masyarakat Bali?” Makalah yang dibawakan dalam

Serasehan Pesta Kesenian Bali (PKB) XXX (sic) pada tanggal 2 Juli di Denpasar.  
Wawancara dengan Kadek Suartaya, pekerjaan Dosen ISI Denpasar, umur 52 Tahun, tanggal 3 Desember 2011.

Wawancara dengan Ida Pedanda Gde Dwija Ngenjung, umur 68 tahun, profesi pendeta, tanggal 22 Februari 2012.